
**DISTRIBUSI DANA DESA DAN EKSELARASI PENGENTASAN KEMISKINAN DI
PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Wahyunadi¹, Mansur Afifi², Mahyudin Nasir³
Universitas Mataram
email: ghalibywahyu@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh secara parsial dan simultan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2016-2020. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Rincian Alokasi Dana Desa (RADD), dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (RATKDD). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel model regresi fixed effect yang diolah dengan *eviews-10*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan pada 8 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2016-2020, sementara variabel Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan selama kurun waktu 2016-2020. Secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Desa berpengaruh signifikan pada 8 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2016-2020.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Desa, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Pada skala regional, pertumbuhan ekonomi dihitung dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode pembangunan tertentu, baik secara riil juga secara nominal. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara, wilayah, atau suatu wilayah. target pembangunan nasional merupakan menurunkan tingkat kemiskinan. PDRB atas dasar harga berlaku mendeskripsikan nilai tambah barang serta jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (BPS 2015-2019). Semakin meningkat PDRB pada suatu daerah maka semakin besar potensi sumber penerimaan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Terdapat beberapa sektor di Provinsi Nusa Tenggara barat yang menjadi penunjang perekonomian, sehingga dapat mendongkrak jumlah PDRB yang semakin meningkat. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang berperan penting pada perekonomian

suatu daerah. Hadirnya sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah pada ekonomi regional yang tergambarkan pada produk domestik regional bruto (PDRB). Daerah yang memiliki berbagai bahan mentah hasil pertanian misalnya, memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai produk domestik regional bruto dengan mengolah hasil pertanian tersebut. Selain itu, eksistensi sektor industri pengolahan turut menjaga pemanfaatan bahan baku yang dihasilkan oleh sektor hulu atau sektor primer. Sektor primer meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Hadirnya sektor industri pengolahan yang kokoh akan memberi kepastian pemasaran dari berbagai output sektor hulu sekaligus menjaga stabilitas harga produk sektor hulu tersebut.

Sektor ekonomi dengan kontribusi terbesar di NTB pada tahun 2020 adalah sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan kontribusi 23,19 persen. Sektor pertambangan dan penggalian berada pada urutan kedua dengan kontribusi 17,37 persen. Di tempat ketiga adalah sektor perdagangan dengan kontribusi 14,20 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB baru mencapai 4,03 persen pada tahun 2020. Kondisi tahun 2020 relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 misalnya, kontribusi sektor industri pengolahan baru mencapai 3,97 persen. Jika merujuk pada kondisi tahun 2020, untuk masuk tiga besar dalam ekonomi NTB, kontribusi sektor industri pengolahan perlu meningkat dari 4 persen menjadi sekitar 15 persen. Kemajuan pembangunan ekonomi NTB di masa mendatang perlu seiring dengan kemajuan sektor industri pengolahan di bumi gora. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan berdampak dengan rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka-angka PDRB tersebut sebagai indikator ekonomi makro dan juga sebagai landasan evaluasi kinerja perekonomian dan penyusunan berbagai kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA.

Konseptentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidak berdayaan kelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural). Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensional.

Sen (1995) menyatakan bahwa kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah (low income), tetapi harus dianggap sebagai ketidakmampuan pabilitas (capability handicap). Definisi yang lebih luas lagi dan menyangkut nyak aspek dikemukakan United Nations Centre for Human Settlements (1996): *overty is more than low or adequate income. It refers to lack of physical cessities, assets and income. A loss of assets is often what precipitates poverty. sets include tangible assets (savings, stores, resources) and intangible assets r instance claims that can be made for help or resources when in need.* Berdasarkan definisi yang diberikan United Nations Centre tersebut, miskin tidak hanya diukur dari kekurangan atau ketidakcukupan income yang eroleh tetapi juga termasuk kehilangan aset. Orang yang tidak memperoleh layanan kesehatan apabila sakit atau kena musibah termasuk miskin. Bahkan ketidakmampuan untuk melakukan saving menurut definisi tersebut sudah masuk dalam kategori miskin.

Chambers (1995), mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (poverty), (2) tidakberdayaan (powerless), (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), (4) ketergantungan (dependence), dan (5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya diri.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa, dananya ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten. Dana Desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini didukung oleh penelitian Dewi dan Irama (2018) menyatakan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian verifikatif yang bertujuan untuk mengkaji teori-teori ekonomi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menyusun hubungan antar variabel atas dasar formulasi rumusan dalam hipotesis. Dengan demikian penelitian ini akan melakukan *hypothesis testing* yaitu menganalisis hubungan antara satu variabel (*dependent variable*) dengan sejumlah variabel lain (*independent variable*) melalui pengujian hipotesis dari serangkaian data empiris yang telah dipublikasikan (*ex-post facto*). Unit analisis dalam penelitian ini adalah 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat bahwa semua kabupaten/kota memiliki karakteristik potensi daerah yang berbeda-beda dan kebijakan pembangunan dengan skala prioritas yang berbeda-beda pula.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data sekunder berupa data *time series* dan data *cross-section* antar kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Rincian Alokasi Dana Desa (RADD), dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (RATKDD).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data runtun waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyusun matrik variabel-variabel yang diperlukan sesuai dengan model analisis. Pengumpulan data akan dilakukan dari berbagai sumber yang telah disebutkan sebelumnya untuk dapat saling melengkapi kekurangan satu dengan lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan metode regresi data panel (pooled data) yaitu kombinasi data *time series* dan data *cross-section* (Gujarati: 2003, Pindyk dan Rubinfeld: 1998).

Estimasi parameter model yang menjelaskan pengaruh pertumbuhan Ekonomi dan Dana Desa terhadap Kemiskinan pada 8 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama 5 (lima) tahun terakhir menggunakan persamaan regresi data panel yaitu : merupakan data yang mempunyai dua dimensi yaitu individu (*cross section*) dan waktu (*time series*). Proses estimasi data panel dapat dilakukan dengan model efek tetap (*Fixed*

Effect Model) dan model efek random (*Random Effect Model*). Pemilihan metode *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah data time series dan data cross-section atau dengan melalui *Hausman Specification Test* yaitu pengujian untuk memastikan apakah gangguan antar individu bersifat tetap atau random. Adapun bentuk persamaan dalam model penelitian ini adalah :

$$K_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 DD_{it} + e_{it}$$

Dimana:

K = Kemiskinan

PE = Pertumbuhan ekonomi

DD = Dana Desa (Rp)

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2,$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

i = Data Cross section (8 kabupaten dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat)

t = Data Time Series (tahun 2016-2020)

e = error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian dari Uji Chow maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel fixed effect yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1
Hasil Model Fixed Effect

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/2/22 Time: 11:41				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 8				
Total panel (balanced) observations: 40				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.51173	1.021878	18.11540	0.0000
PERT. EKONOMI	0.000188	9.02E-05	2.090142	0.0452
DANADESA	-2.91E-08	4.80E-09	-6.065965	0.0000
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.977133	Mean dependent var	16.76350	
Adjusted R-squared	0.970273	S.D. dependent var	5.329481	
S.E. of regression	0.918885	Akaike info criterion	2.881007	
Sum squared resid	25.33049	Schwarz criterion	3.303226	
Log likelihood	-47.62013	Hannan-Quinn criter.	3.033668	
F-statistic	142.4372	Durbin-Watson stat	1.131136	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah dengan Eviews-10

Berdasarkan pada hasil pengolahan data dengan model regresi data panel dengan model regresi data panel Fixed Effect di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 18.51173 + 0.000188 X1 - 2.91E-08 X2$$

Dimana :

Y = Kemiskinan

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Dana Desa

Dari model persamaan regresi data panel diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

β_0 : Diperoleh nilai konstanta β_0 sebesar 18.51173. Artinya, apabila variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Desa) bernilai nol (0) maka nilai variabel dependen (Kemiskinan) sebesar 18.51173 persen.

β_1 :Diperoleh nilai β_1 sebesar 0.000188. Artinya apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) naik sebesar satu satuan maka Kemiskinan (Y) naik sebesar 0.000188 persen dengan asumsi variabel Dana Desa (X2) dianggap tetap.

β_2 : Diperoleh nilai β_2 sebesar -2.91E-08. Artinya apabila variabel Dana Desa (X2) naik sebesar satu satuan maka Kemiskinan (Y) turun sebesar 2.91 persen dengan asumsi variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) dianggap tetap.

Berdasarkan hasil uji t statistik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara individu/sendiri-sendiri/parsial terdapat dua variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Dana Desa (X2) berpengaruh positif dan negatif signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kemiskinan (Y).

Uji F statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Desa) terhadap variabel dependen (Kemiskinan) secara bersama-sama atau simultan. Adapun kriteria pengujiannya adalah jika F hitung > F tabel dan nilai probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima begitu sebaliknya.

Berdasarkan pada tabel 4.5, dapat diketahui bahwa hasil uji F statistik dengan nilai F hitung sebesar 142,4372 dan nilai F tabel sebesar 3,25, dimana besarnya nilai F tabel diperoleh dari $df = k-1$; $n-k$ ($df = 3-1=2$; $n-k = 40-3=37$, jadi $df = 2 ; 37$) dengan alpha (α) sebesar 0,05 (5%). Sehingga besar nilai F hitung > F tabel ($142,4372 > 3,25$) dan nilai probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga diterima yang mengartikan semua variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Dana Desa (X2) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kemiskinan (Y).

Dari hasil uji parsial dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0452 ($0,0452 < 0,05$) dan koefisien sebesar 0.000188, dimana berdasarkan nilai signifikansi tersebut mengartikan bahwa hipotesis yang telah dirumuskan yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y) pada kabupaten di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020 tidak dapat diterima atau hasil tersebut tidak sejalan dengan hipotesis yang telah dirumuskan dan teori yang mendukungnya. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan maka menyebabkan peningkatan pada kemiskinan sebesar 0.000188 persen.

Tentunya kenaikan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga penulis mulai meninjau dan menganalisis sektor-sektor unggulan di Provinsi NTB.Sesuai dengan dijelaskan dalam website resmi Provinsi NTB bahwa terdapat empat sektor unggulan yang membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri dan sektor pariwisata.Sektor-sektor ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta PDRB di wilayah, namun juga dapat berdampak pada penurunan kemiskinan.

Jika dilihat lebih lanjut, selama periode 2016-2020, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian terlihat berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2016 persentase indikator tersebut sebesar 36,87 persen dan pada tahun 2020 telah berada pada angka 31,42 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya peralihan pekerjaan penduduk miskin dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Sektor pertanian semakin kurang menjanjikan dan lahan pertanian pun semakin berkurang dan juga upah bagi pekerja informal umumnya masih di bawah upah minimum sehingga mereka tetap berada di bawah garis kemiskinan dan masih membutuhkan bantuan-bantuan dari program kemiskinan yang telah digalakkan.

Sesuai data laju pertumbuhan PDRB ADH 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2016-2020, sektor pertanian mengalami penurunan mulai dari tahun 2018 sebesar 2,01 persen kemudian menurun hingga tahun 2020 sebesar -0,43 persen. Penurunan ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti cuaca ekstrem yang dapat membuat gagal panen, kekurangan lahan, dan sebagainya.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna pengurangan angka kemiskinan perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan faktor produksi yang secara langsung dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Bisa jadi pertumbuhan sektor pertanian, bangunan hotel dan lainnya tinggi namun jika pertumbuhan tersebut berasal dari kelompok usaha tertentu yang sangat padat modal maka pertumbuhan itu belum tentu dapat mengurangi angka kemiskinan.

Selain sektor pertanian, sektor unggulan lainnya ialah sektor pariwisata. Sektor pariwisata membantu menyokong pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahun 2018 kontribusi sektor pariwisata terhadap upaya penurunan angka kemiskinan yang dirasakan belum optimal. Dikarenakan ada indikasi sebagian besar barang dan jasa yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan masih di datangkan dari luar NTB. Sedangkan hasil-hasil pertanian, peternakan maupun kerajinan di NTB belum secara optimal dimanfaatkan untuk melayani wisatawan yang berkunjung ke NTB. Kemudian pada tahun 2018 juga kunjungan wisatawan terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan adanya bencana gempa bumi khususnya di Pulau Lombok. Hal ini berdampak pada para pekerja di sektor tersebut yang mengalami kekosongan wisatawan yang berimbas pada penurunan pendapatan dan meningkatnya kemiskinan pada pasca bencana tersebut (ntbprov.go.id).

Dari hasil uji parsial dapat diketahui bahwa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 ($0,0000 < 0,05$) dan koefisien sebesar $-2.91E-08$, dimana berdasarkan nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis Kedua diterima, dimana hipotesis tersebut yaitu Dana Desa (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y) pada Kabupaten di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan maka menyebabkan penurunan pada kemiskinan sebesar 2,91 persen.

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Pada tahun 2021, arah kebijakan Dana Desa antara lain yaitu untuk mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, jaring pengaman sosial berupa BLT Desa, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Sektor Usaha Pertanian, serta pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Dana Desa juga akan diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor prioritas melalui pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya peternakan, perikanan dan perbaikan fasilitas kesehatan (bpkp.go.id).

Kebijakan dana desa yang digelontorkan di perdesaan dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan di tingkat desa. Salah

satu caranya adalah dengan memberikan peluang untuk warga miskin mendapatkan pekerjaan dengan adanya program padat karya di perdesaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Kosasih (2020), yang melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel Dana Desa memiliki pengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa mampu secara efektif menurunkan jumlah penduduk miskin. Dampak yang diharapkan masih terbilang kecil terhadap kemiskinan tapi mampu mengurangi kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Variabel dana desa secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dimana dampak yang diharapkan masih terbilang kecil terhadap kemiskinan tapi mampu mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, hubungan dana desa dan kemiskinan memiliki hubungan berlawanan. Variabel pertumbuhan ekonomi dan dana desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

REFERENSI

- Adam, Antonis., dkk. 2008. Fiscal Decentralization and Public Sector Efficiency: Evidence from OCED Countries.
- Afonso, Antonio, L. Schuknecht and V. Tanzi (2005). “Public Sector Efficiency: An International Comparison”, *Public Choice*, 123 (3-4), 321 – 47
- Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Bird, R. and Rodriguez, E. R.. 1999. Decentralization and poverty alleviation. International experience and the case of the Philippines. *Public Admin. Dev.*, 19: 299–319.
- Chambers, 1988, R. 1995. Poverty and live lihoods: who sereality counts? The Institute of Development Studies, University of Sussex, Falmer, Brighton BN19RE, UK
- Hakimudin, Dimas Rizal, 2010, Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2007.
- Juanita. 2002. Kesehatan dan Pembangunan Nasional. Medan: Univ. Sumatera Utara
- Kurnia, Akhmad Syakir, 2010. Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH), *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.11, No.1:1-20.
- Kuznet S. 1955. Economic growth and income inequality. *The American Economic Review* 45:1-28
- Lucas R.E. 1988. On The Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, Vol. 22(1):3-42.
- Machfud Sidik. 2002. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. Dirjen PKPD DepKeu R.I. Jakarta.
- Mankiw, Gregory., 2007. Makroekonomi Edisi Keenam. Erlangga, Jakarta.
- Musgrave, Richard A. and Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore, Mc. Graw-Hill Book Co.

- OECD, 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide.
- Sen A, 1995. The political economy of targeting. Dalam Vande Walle D, Nead K, editor. Public Spending and The Poor. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Stiglitz, Joseph E. 2003. Economics of the Public Sector, Third Edition, Norton McGraw-Hill.
- UN, 2007, Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies.
- Von Braun, J. and U. Grote. 2002. Does Decentralization Serve the Poor? In Managing Fiscal Decentralization ed. E. Ahmad, and V. Tanzi. London and New York: Routledge.